

**PRAKTIK SOSIAL CERAI GUGAT DI WILAYAH
PANYABUNGAN:
STUDI KASUS TERHADAP 14 PEREMPUAN ETNIS
MANDAILING**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
PASCASARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**PRAKTIK SOSIAL CERAI GUGAT DI WILAYAH
PANYABUNGAN:**

**STUDI KASUS TERHADAP 14 PEREMPUAN ETNIS
MANDAILING**

UNIVERSITAS ANDALAS

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh:

**MUHAMMAD ACHSAN SHABILY
25201811006**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
PASCASARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

MUHAMMAD ACHSAN SHABILY, BP 2520811006, Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Judul Tesis: Praktik Sosial Cerai Gugat Di Wilayah Panyabungan: Studi Kasus Terhadap 14 Perempuan Etnis Mandailing. Pembimbing I Dr. Jendrius, M.Si, Pembimbing II Dr. Maihasni, M.Si.

ABSTRAK

Sistem kekerabatan yang patrilineal dan patriarki dalam etnis Mandailing berbasis *Dalihan Na Tolu* secara tradisional menempatkan perempuan pada posisi subordinat, inferior dan dependen akibat terbatasnya akses terhadap otoritas dan sumber daya. Namun, meskipun menghadapi hambatan struktural, kultural spiritual dan stigma sosial yang kuat, data statistik di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa jumlah perkara cerai gugat justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak sepanjang tahun 2020-2024. Kontradiksi antara berbagai hambatan yang dilalui oleh perempuan dengan tingginya inisiatif hukum untuk menggugat cerai mengindikasikan adanya dinamika baru dalam hubungan antara agen dan struktur sosial pada ruang dan waktu saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami praktik sosial cerai gugat perempuan Mandailing di wilayah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

Penelitian ini menerapkan teori strukturasi Anthony Giddens yang dinilai mampu mengungkap tingginya angka cerai gugat sebagai sintesis dari struktur yang *enabling* dan tingkat kesadaran agen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, *accidental sampling* dan *snowball sampling* yang terdiri dari 14 informan pelaku dan 6 informan pengamat. Adapun proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam serta studi dokumen. Analisis data milik Miles dan Huberman digunakan dalam mengkodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan secara aktif memobilisasi berbagai peraturan baik ditingkat keluarga, komunitas, maupun negara melalui kesadaran diskursif mereka. Dalam tingkat keluarga, perempuan menggunakan konsep keluarga dalam agama Islam dan memaknai sikap keluarga sebagai legitimasi untuk menggugat. Dalam tingkat komunitas adat, perempuan memaknai ulang mengenai status janda dan memaknai prosesi *halang batang* sebagai legitimasi untuk bercerai. Dalam tingkat negara, perempuan memaknai perceraian melalui Pengadilan Agama sebagai jalan meraih kepastian status pernikahan sekaligus menggunakan legitimasi prosedural sebagai dalil bagi tindakan cerai gugat dan perempuan secara aktif memobilisasi berbagai sumber daya yang disediakan negara demi kepentingan mereka masing-masing.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Perempuan Mandailing, Patrilineal-patriarki, Gender, Strukturasi

MUHAMMAD ACHSAN SHABILY, BP 2520811006, Master's Program in Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: Social Practice of Wife-Initiated Divorce in the Panyabungan Area: A Case Study of 14 Mandailing Ethnic Women. Supervisor I Dr. Jendrius, M.Si, Supervisor II Dr. Maihasni, M.Si.

ABSTRACT

The patrilineal and patriarchal kinship system of the Mandailing ethnic group, based on the Daliha Na Tolu customary framework, has traditionally positioned women in a subordinate, inferior, and dependent status due to their limited access to authority and resources. However, despite facing structural, cultural-spiritual, and strong social stigma related barriers, statistical data from Mandailing Natal Regency show that the number of wife-initiated divorce (*cera! gugat*) cases was in fact higher than husband-initiated divorce (*cera! talak*) cases throughout 2020-2024. This contradiction between the various obstacles faced by women and the high rate of legal initiatives to file for divorce indicates the emergence of new dynamics in the relationship between agency and social structure within the current spatial and temporal context. This study therefore aims to identify and understand the social practice of wife-initiated divorce among Mandailing women in the Panyabungan area of Mandailing Natal Regency, North Sumatra.

This study employs Anthony Giddens' structuration theory, which is considered capable of explaining the high rate of wife-initiated divorce as a synthesis of enabling structures and the level of agents' consciousness. A qualitative case study approach was used. Informants were determined through purposive sampling, accidental sampling, and snowball sampling techniques, consisting of 14 informants who were divorce actors and 6 observer informants. Data collection was conducted through passive participant observation, in-depth interviews, and document study. Data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data coding, data display, and conclusion drawing.

The findings show that women actively mobilize various regulations at the family, community, and state levels through their discursive consciousness. At the family level, women draw on the Islamic concept of family and interpret family attitudes as a legitimation for filing divorce. At the level of the customary community, women reinterpret the status of widowhood and construe the *halang batang* procession as a legitimation for divorce. At the state level, women interpret divorce through the Religious Court as a means of achieving legal certainty over marital status, while also using procedural legitimacy as grounds for pursuing wife-initiated divorce; women likewise actively mobilize various resources provided by the state in accordance with their respective interests.

Keywords: Female-Initiated Divorce (*Cera! Gugat*), Mandailing Women, Patrilineal-Patriarchy, Gender, Structuration